

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA**

**(SABMN) TERHADAP ASET TETAP PADA DINAS SOSIAL PROVINSI**

**SUMATERA SELATAN**



**SKRIPSI OLEH:**

**TARIYEM**

**NIM. 01061003088**

**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat**

**Guna Mencapai Gelar**

**Sarjana Ekonomi**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**INDERALAYA**

**TAHUN 2011**

657.420 7

Tar

9 ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA

2011 (SABMN) TERHADAP ASET TETAP PADA DINAS SOSIAL PROVINSI

SUMATERA SELATAN



**SKRIPSI OLEH:**

**TARIYEM**

**NIM. 01061003088**

**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat**

**Guna Mencapai Gelar**

**Sarjana Ekonomi**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**INDERALAYA**

**TAHUN 2011**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
INDERALAYA**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

NAMA : TARIYEM  
NIM : 01061003088  
JURUSAN : AKUNTANSI  
MATA KULIAH : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
JUDUL : ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI  
BARANG MILIK NEGARA (SABMN) TERHADAP ASET  
TETAP PADA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA  
SELATAN

**PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI**

TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

Tanggal: 12 Mei 2011

Ketua

:



Ahmad Subeki, SE, M.M, Ak  
NIP. 19650816 199512 1 001

Tanggal: 11 Mei 2011

Anggota

:



H. Aspahani, SIF, M.M, Ak  
NIP. 19660704 199203 1 004

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI/TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Tariyem  
Nim : 01061003088  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

**Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN)**

**Terhadap Aset Tetap Pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.**

Pembimbing

Ketua : Ahmad Subeki, SE, M.M, Ak  
Anggota : H. Aspahani, SE, M.M, Ak  
Tanggal diujikan : 09 Mei 2011

adalah benar-benar hasil karya saya dibawah bimbingan tim pembimbing.

Isi skripsi ini tidak ada hasil karya orang lain yang saya salin keseluruhan atau sebagian tanpa menyebutkan sumber aslinya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan, termasuk pembatalan gelar kesarjanaan saya.

Inderalaya, 09 Mei 2011

Yang memberi pernyataan,



Tariyem  
NIM. 01061003088

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
**INDERALAYA**

**TANDA PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF**

NAMA : TARIYEM  
NIM : 01061003088  
JURUSAN : AKUNTANSI  
MATA KULIAH : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
JUDUL : ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI  
BARANG MILIK NEGARA (SABMN) TERHADAP ASET  
TETAP PADA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA  
SELATAN

Telah dilaksanakan ujian komprehensif pada tanggal 9 Mei 2011 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian komprehensif  
Inderalaya, 9 Mei 2011

Ketua,



Ahmad Subeki, SE, M.M, Ak  
NIP. 19650816 199512 1 001

Anggota,



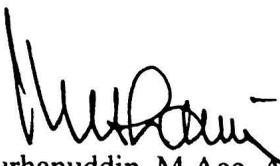
H. Aspahani, SE, M.M, Ak  
NIP. 19660704 199203 1 004

Anggota,



Arista Hakiki, SE, M.Acc, Ak  
NIP. 19730317 199703 1 002

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi



Drs. Burhanuddin, M.Acc, Ak  
NIP. 19580828 198810 1 001

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

”Bersyukurlah atas nikmat Allah, sesungguhnya bumi tempat menetap dan langit sebagai atap dan membentuk kamu selalu membaguskan rupamu serta memberi kamu rizki dengan sebagian yang baik-baik. Yang demikian itu adalah Allah Tuhanmu, Maha Agung Allah, Tuhan semesta alam” (QS. Al-Mukmin: 64).

”Jalanilah hidupmu dengan penuh kesabaran, karena sabar merupakan rahmat yang membuatmu penuh dengan keberkahan atas segala nikmat Allah SWT yang diberikan kepadamu”.

Kupersembahkan Kepada:

- ☞ Kedua Orang Tuaku Tercinta
- ☞ Suamiku Tercinta Ajun Pratikno
- ☞ Anakku Tersayang Sya’banniah Ummamah
- ☞ Saudara-saudaraku
- ☞ Pembimbing Skripsiku
- ☞ Sahabat-sahabatku
- ☞ Almamaterku

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kekuatan bagi penulis untuk menyelesaikan salah satu tugas akhir di Program Strata 1 Universitas Sriwijaya yaitu menyusun skripsi berjudul "Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) terhadap Aset Tetap pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan".

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Subeki, SE, M.M, Ak dan Bapak H. Aspahani SE, M.M, Ak selaku pembimbing skripsi yang telah banyak membantu memberikan arahan dan petunjuk yang sangat berarti bagi selesainya skripsi penulis ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah sangat membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat dipergunakan juga bagi banyak pihak kedepannya dalam mencapai terciptanya ekonomi yang sehat disetiap lini perekonomian. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya perkembangan dan perbaikan dari skripsi ini sangat diharapkan.

Inderalaya, 09 Mei 2011

Tariyem

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) terhadap Aset Tetap pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan”** sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dan memberi dukungan baik moril maupun materil dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Prof. Dr. Hj. Badia Perizade, MBA, Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Prof. H. Syamsurijal AK, Ph.D, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Drs. Burhanuddin, M.Acc, Ak, Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Ahmad Subeki, SE, M.M, Ak, Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya sebagai Ketua Pembimbing Skripsi.
5. H. Aspahani, SE, M.M, Ak, Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya sebagai Anggota Pembimbing Skripsi.
6. Arista Hakiki, M.Acc, Ak, Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya sebagai anggota penguji tamu pada Ujian Komprehensif.
7. Bapak/Ibu dosen yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
8. Kepala dan staf pegawai Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
9. Staf Pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

10. Kedua orang tua, suami dan anakku tercinta yang telah memberikan semangat dan dukungan serta senantiasa ada untuk berbagi cerita.
11. Saudara-saudaraku yang selalu mendoakanku dan menjadi salah satu alasan terselesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan dan adik-adik tingkat di mushola yang telah banyak memberikan dukungannya.

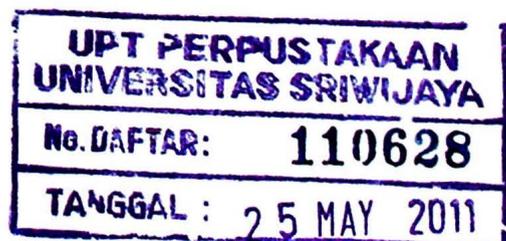
Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian dan memberikan berkah yang berlimpah bagi kita semua, Amin.

Penulis,

Tariyem

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA UJIAN KOMPREHENSIF.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
ABSTRAKSI.....	xv
ABSTRACT .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Pembahasan .....	6



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat.....	8
2.1.1.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat .....	9
2.1.1.2 Ruang Lingkup Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat .....	11
2.1.1.3 Tujuan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat ....	12
2.1.1.4 Ciri-ciri Pokok Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat.....	12
2.1.1.5 Klasifikasi Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat .....	13
2.1.2 Sistem Akuntansi Barang Milik Negara.....	15
2.1.2.1 Gambaran Umum Sistem Akuntansi Barang Milik Negara .....	15
2.1.2.2 Tujuan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara .....	17
2.1.2.3 Struktur Organisasi.....	18
2.1.2.4 Dokumen Sumber Barang Milik Negara.....	24
2.1.3 Aset Tetap .....	25
2.1.3.1 Pengertian Aset Tetap .....	26
2.1.3.2 Karakteristik Aset Tetap.....	27
2.1.3.3 Siklus Pengelolaan Aset Tetap.....	27
2.1.3.4 Isu-isu Strategis dalam Pengelolaan Aset Tetap .....	31

2.1.3.5 Pengendalian Internal Aset Tetap.....	31
2.1.3.6 Tujuan Pengendalian Internal Aset Tetap .....	32
2.1.3.7 Karakteristik Pengendalian Internal Aset Tetap .....	32
2.1.4 Aspek Akuntansi atas Aset Tetap.....	33
2.1.5 Penerapan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) terhadap Aset Tetap.....	43
2.2 Penelitian Terdahulu .....	44

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	46
3.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	47
3.3 Operasionalisasi Variabel.....	47
3.4 Populasi dan Sampel .....	48
3.5 Data yang Diperlukan.....	48
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	49
3.7 Analisis Data dan Teknik Analisis .....	50
3.7.1 Uji Validitas .....	51
3.7.2 Uji Reliabilitas.....	51
3.7.3 Uji Normalitas .....	52
3.7.4 Pengujian Korelasi .....	52
3.7.5 Analisis Regresi Linear Sederhana .....	53

### BAB IV GAMBARAN UMUM DINAS SOSIAL PROVINSI

#### SUMATERA SELATAN

4.1 Sejarah Singkat Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan .....	54
--	----

4.2 Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan ..	55
4.3 Visi dan Misi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.....	56
4.4 Tujuan Organisasi .....	57
4.5 Sasaran .....	57
4.6 Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.....	59
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
5.1 Data Penelitian yang Dikumpulkan.....	60
5.2 Pembahasan Hasil Kuesioner .....	60
5.3 Pengujian Data .....	62
5.3.1 Uji Validitas dan Reliabilitas .....	62
5.3.2 Uji Normalitas Data .....	71
5.3.3 Pengujian Korelasi .....	72
5.3.4 Analisis Regresi Linear Sederhana .....	73
5.4 Analisis Penerapan SABMN terhadap Pengelolaan Aset Tetap.....	74
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
6.1 Kesimpulan.....	77
6.2 Keterbatasan .....	78
6.3 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA .....	80
LAMPIRAN.....	a

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	47
Tabel 5.1 Rekapitulasi Kuesioner Penerapan SABMN (X) dan Pengelolaan Aset Tetap (Y).....	61
Tabel 5.2 Hasil Tahap Pertama Uji Validitas dan Reliabilitas Item Pertanyaan Penerapan SABMN dengan Teknik Alpha.....	63
Tabel 5.3 Hasil Tahap Kedua Uji Validitas dan Reliabilitas Item Pertanyaan Penerapan SABMN dengan Teknik Alpha.....	64
Tabel 5.4 Hasil Tahap Ketiga Uji Validitas dan Reliabilitas Item Pertanyaan Penerapan SABMN dengan Teknik Alpha.....	65
Tabel 5.5 Hasil Tahap Pertama Uji Validitas dan Reliabilitas Item Pertanyaan Pengelolaan Aset Tetap dengan Teknik Alpha.....	67
Tabel 5.6 Hasil Tahap Kedua Uji Validitas dan Reliabilitas Item Pertanyaan Pengelolaan Aset Tetap dengan Teknik Alpha.....	68
Tabel 5.7 Rekapitulasi Kuesioner Penerapan SABMN (X) dan Pengelolaan Aset Tetap (Y) setelah Uji Validitas dan Reliabilitas .....	70
Tabel 5.8 Hasil Uji Korelasi .....	72
Tabel 5.9 Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana .....	73

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Organisasi Akuntansi BMN .....	19
Gambar 2.2 Bagan Organisasi Akuntansi BMN UAKPB .....	20
Gambar 2.3 Bagan Arus Laporan BMN .....	23
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Sum Sel.....	59
Gambar 5.1 Hasil Uji Asumsi Normalitas .....	71

# **ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SABMN) TERHADAP ASET TETAP PADA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN**

## **ABSTRAKSI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) dan pengaruhnya terhadap aset tetap pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan menggunakan kuesioner dalam pengumpulan datanya, dimana disebarakan kepada staf subbagian umum dan kepegawaian, bidang penyuluhan dan hubungan antar lembaga, bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, bidang bantuan dan jaminan sosial, dan bidang pemberdayaan sosial yang menangani langsung masalah pembelian dan pengelolaan inventaris pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan hasil pengujian data kuesioner diperoleh kesimpulan bahwa Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan telah menerapkan SABMN dalam pengelolaan aset tetapnya secara baik dan konsisten. Selain itu, penerapan SABMN pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan aset tetapnya.

**Kata kunci: Penerapan SABMN dan Pengelolaan Aset Tetap**



***ANALYZE THE IMPLEMENTATION OF STATE PROPERTY ACCOUNTING  
SYSTEM (SABMN) TOWARD FIXED ASSETS IN SOCIAL SERVICE  
SOUTHERN SUMATRAN PROVINCE***

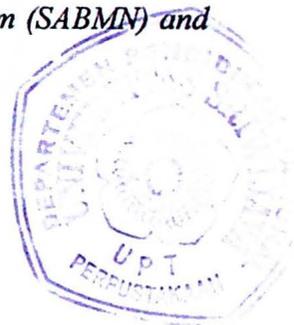
***ABSTRACT***

*This research to figure out how the implementation of State Property Accounting System (SABMN) and the influence toward fixed assets in Social Service Southern Sumatran Province.*

*This is quantitative research by using questionnaire in data collection which spread out to staff of general and employee sub-section, field of counseling and inter-institutional relations, field of service and social rehabilitation, field of relief and social security, and field of social empowerment.*

*Based on the testing result questionnaire data obtained a conclusion that Social Service Southern Sumatran Province has implemented State Property Accounting System (SABMN) in the management of their fixed assets properly and consistently. Besides that, the implementation of State Property Accounting System (SABMN) in Social Service Southern Sumatran Province positively and significantly influence toward management fixed assets.*

*Key words: The implementation of State Property Accounting System (SABMN) and management of fixed assets*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum.

Hal tersebut diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara selanjutnya mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu komite standar yang independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan presiden tentang komite standar akuntansi pemerintahan.

Berkaitan dengan UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka salah satu kandungan dalam peraturan pemerintah dimaksud adalah adanya perubahan pengelolaan aset yang mengarah pada *State Property Management*. Aset Negara diarahkan pada *The Best Assets Management*, dimana dalam pengelolaan kekayaan negara ada dua fungsi utama yaitu fungsi budgeter dan sosial. Fungsi budgeter adalah bagaimana caranya sebagai pengelola dapat *menggenerate revenue* atas pengelolaan kekayaan negara tersebut dengan cara seperti disewakan, Bangun *Serah Gyba* atau Bangun Guna Serah, pemindahtanganan

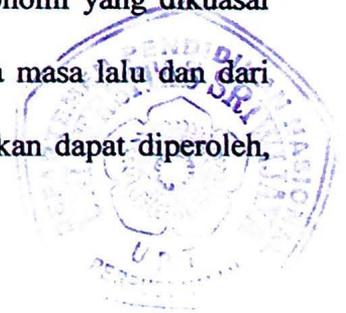
seperti Penyertaan Modal Pemerintah dan bentuk lainnya, sedangkan fungsi sosial seperti dihibahkan dan lainnya yang lebih menekankan kepada kepentingan umum/masyarakat.

Masalah yang dihadapi adalah nilai aset Kementerian/LPND dimaksud belum merupakan penggambaran akurat dari nilai aset yang sebenarnya, karena belum semua Satuan Kerja memasukan laporan Barang Milik Negara (BMN) yang menjadi tanggung jawabnya. Masalah lain terkait penyebab tersebut mencakup adanya Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN), perubahan organisasi pengelola barang milik negara dengan adanya penggabungan satuan kerja menjadi balai, masalah kompetensi sumber daya manusia dan masalah adanya okupasi ilegal atas aset berupa tanah serta masalah prasarana dan sarana pendukung termasuk belum adanya standar, prosedur dan manual lainnya.

UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan bahwa dalam pengelolaan keuangan di Kementerian Negara/Lembaga atau instansi dikenal adanya Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di satu pihak, serta Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang di pihak yang lain.

Dalam rangka pertanggungjawaban, pengguna anggaran melaksanakan akuntansi keuangan, sedangkan pengguna barang dan kuasa pengguna barang melaksanakan SABMN. Kemudian untuk mendukung pelaporan di tiap-tiap Satuan Kerja di lingkungan Kementerian/LPND perlu dilaksanakan pembinaan kepada penanggung jawab yang melaksanakan pelaporan barang milik negara.

Dalam akuntansi pemerintah, BMN merupakan bagian dari aset pemerintah pusat yang berwujud. Aset pemerintah adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh,



baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat karena alasan sejarah dan budaya, BMN tercakup dalam aset lancar dan aset tetap, aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sedangkan aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. BMN yang berupa aset lancar adalah persediaan, sedangkan BMN yang berupa aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan.

Penyelenggaraan akuntansi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan pengelolaan BMN pada kementerian negara/lembaga. Untuk kementerian negara/lembaga yang mendapatkan alokasi anggaran pembiayaan dan perhitungan, apabila dalam realisasinya menghasilkan BMN maka BMN tersebut dibukukan sebagai aset kementerian negara/lembaga tersebut. Apabila kementerian negara/lembaga mengalokasikan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan, maka sepanjang belum dihibahkan, semua barang yang diperoleh dari dana dekonsentrasi/tugas pembantuan merupakan BMN yang dimiliki/dikuasai kementerian negara tersebut.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah pusat melalui kementerian negara/lembaga kepada gubernur selaku wakil pemerintah dimana dana tersebut berasal dari APBN yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Dana dekonsentrasi merupakan bagian dari

anggaran kementerian negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja kementerian negara/lembaga dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditetapkan gubernur.

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan selaku penerima dana dekonsentrasi juga tentu harus menerapkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terutama SAI yang terkait dengan SABMN yang berhubungan dengan pelaporan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan atas BMN yang dikelolanya. Dimana hal ini telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan dana dekonsentrasi, berdasarkan usulan dari gubernur, kementerian negara/lembaga menetapkan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan sebagai UAKPA/UAKPB dekonsentrasi, dan penanggung jawab UAKPA/UAKPB dekonsentrasi adalah kepala SKPD (Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan) yang menerima dana dekonsentrasi dimana pelaporan keuangan/barang atas pelaksanaan dekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari pelaporan keuangan/barang atas pelaksanaan tugas pembantuan dan APBD. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan mempertanggungjawabkan pelaksanaan dana dekonsentrasi kepada kementerian negara/lembaga melalui gubernur. Pertanggungjawaban pelaksanaan yang dilakukan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan tersebut berupa Laporan Keuangan dan Laporan BMN.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul ***“Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) terhadap Aset Tetap pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan”***.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Perumusan masalah yang dapat ditarik dari latar belakang di atas adalah:

1. Apakah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan telah menerapkan SABMN dalam pengelolaan aset tetapnya?
2. Bagaimana pengaruh penerapan SABMN terhadap pengelolaan aset tetap pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan SABMN dan pengaruhnya terhadap pengelolaan aset tetap pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru yang lebih luas, melatih dalam berpikir secara sistematis dan ilmiah, serta mengembangkan kemampuan untuk melakukan analisis terhadap masalah yang lebih kritis. Selain itu juga merupakan salah satu syarat dalam menempuh ujian tingkat sarjana pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya.

2. Bagi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dan khususnya Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan agar dapat menerapkan SABMN dengan baik sehingga pengelolaan aset tetap dapat berjalan efektif dan efisien.

### 3. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat membuka pikiran masyarakat atas kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dan juga menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

## 1.5 Sistematika Pembahasan

Dalam bagian ini, penulis akan menguraikan secara garis besar mengenai penelitian yang akan dilakukan. Skripsi ini akan ditulis dalam enam bab, yaitu:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari lima subbab, yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang teori-teori yang digunakan untuk mendukung penelitian dan beberapa penelitian terdahulu.

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang jenis penelitian, tempat atau lokasi penelitian, operasionalisasi variabel, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, analisis data dan teknik analisis.

### BAB IV GAMBARAN UMUM DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

Bab ini berisikan gambaran umum Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan tempat penelitian ini berlangsung.

## **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan deskripsi hasil pengujian kuesioner serta pembahasan yang berisi tentang perbandingan antara temuan yang dihasilkan dari proses penelitian dengan teori yang ada.

## **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menguraikan kesimpulan dari penelitian yang merupakan hasil jawaban dari perumusan masalah serta saran yang merupakan rekomendasi dan implikasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asmoko, Hendri. *Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektivitas Pengendalian*. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol 2 No 2.
- Bungin, Burhan. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002* Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Keputusan Presiden No. 72 Tahun 2004* Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003* Tentang Pengadaan Barang Milik Daerah.
- Keputusan Menteri Keuangan No. 18/KMK.018/1999* Tentang Klasifikasi dan Kodefikasi Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah dalam Buletin Teknis No. 01* Tentang Definisi Aset Tetap.
- Kuncoro, Mudrajad. 2007. *Metode Kuantitatif (Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi)*. Yogyakarta: CV. AMP YKPN.
- Mulyadi. 2007. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyani, Osep. 2009. *Analisa Penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) terhadap Pengelolaan Asset Di Lingkungan Departemen Sosial RI*. Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Gunadarma, Jakarta (tidak dipublikasikan).
- Nurhayati, Isnaeni. 2007. *Penerapan Sistem Akuntansi Instansi dan SAKIP terhadap Karakteristik Kualitatif Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran*. Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya (tidak dipublikasikan).
- Penjelasan UU No. 1 Tahun 2004* Tentang Perbendaharaan Negara.
- Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2008* Tentang Susunan Organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
- Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 49 Tahun 2008* Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
- Peraturan Ditjen Perbendaharaan No. : PER-21/PB/2005* Tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Negara/Lembaga TA 2005.

- Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.06/2005 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.*
- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.*
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*
- Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 Tentang Pengelola Barang Milik Negara/Daerah.*
- Permendagri No. 17 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah.*
- Priyatno, Duwi. 2008. *Mandiri Belajar SPSS untuk Analisis Data & Uji Statistik*. Jakarta: Mediakom.
- . 2010. *Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian dengan SPSS*. Yogyakarta: Gava Media.
- Reeve, James, Warren, Carl S, dkk. 2009. *Pengantar Akuntansi Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rudianto, 2009. *Pengantar Akuntansi Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto. 2009. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: PT Indeks.
- Syadza, Abine. 2008. *Gambaran Umum Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat. Artikel Online*. Diambil pada tanggal 20 April 2010 diakses dari [http://www. google. com](http://www.google.com).
- Undang Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.*
- Undang Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.*
- Undang Undang No. 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2005.*
- Undang Undang No. 25 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Peraturan Pelaksananya.*
- Yusuf, M. 2010. *8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zulganef. 2008. *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.